

PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM MODEL MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Jarman Arroisi, Martin Putra Perdana, Achmad Reza Hutama Al Faruqi*

Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia

* hutama@unida.gontor.ac.id

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i2.223

Received: July 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Abstract :

Muhammadiyah and NU are two of the largest Islamic organization in Indonesia. Both of these organizations have significant mass and inter-related to each other. These organizations stand up long before the independence of Indonesia announced. Muhammadiyah itself was founded by Kyai Ahmad Dahlan and Nahdlatul Ulama Hasyim was initiated by Kyai Ash'ari. Sincerity and the struggle of its founder, who make this great organization can exist and be accepted by the community to this day. The organization is also a symbol of strength of the Islamic organizations in Indonesia. The two religious organizations also does little merit in the fight for Indonesia's independence. Although many of the negative view that menyasar him but did not make the harmony both fade. It is visible from their struggle in propagating dakwahnya in Indonesia with sincere and full of struggle. Da'wah movement not only focused in purification of belief but also plays a role in answering the problems that exist in society. By using the methods to critical review I tried to dig the closeness between the Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama which can not be disputed again.

Key words : *Renewal, Thought, Muhammadiyah, NU*

Abstrak :

Kajian ini bertujuan meneliti sepak terjang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi ini memiliki massa yang cukup banyak dan saling berkaitan satu sama lain. Organisasi ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diplokanirkan. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 M oleh Kyai Ahmad Dahlan sedangkan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini menemukan tiga kesimpulan penting. Pertama, dengan keikhlasan dan kegigihan pendiri, menjadikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa diterima dan eksis di masyarakat hingga saat ini. Kedua, organisasi ini menjadi simbol perjuangan ormas Islam di Indonesia. Ketiga, para tokoh kedua organisasi ini berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan polanya masing-masing. Terbukti dengan Muhammadiyah yang menggunakan metode modern struktural sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Tradisional kultural. Untuk lebih dalam mengetahui mengenai pembaharuan pemikiran Islam model Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maka dalam makalah ini pembaca dapat menyelami lebih lanjut.

Kata Kunci : *Pembaharuan, Pemikiran, Muhammadiyah, NU*

PENDAHULUAN

Ide tentang gerakan pembaharuan Islam pada dasarnya sudah dirintis sejak lama. Sudah beberapa abad terakhir kita bisa melihat peran berbagai tokoh Muslim dalam mengembangkan dan mengemas Islam dengan berbagai rupa. Dengan intinya yang satu kesatuan, yakni menyebarkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh jagad raya. Lahirnya gerakan pembaharuan, diilhami oleh perlunya perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek agama sendiri, diharapkan dengan adanya gerakan pembaharuan Islam dapat memahami kembali agama Islam sesuai al-Qur'an dan sunnah. Menjauhi segala bid'ah, khurafat, mitos, dan takhayul yang banyak mengakar di dalam kawasan masyarakat tradisional. Yang banyak terpengaruh oleh budaya dan kebiasaan tradisional setempat. Dan juga diharapkan bisa memerangi dan meluruskan apa saja yang bertentangan dengan ajaran syari'at Islam.

Dengan adanya motivasi seperti itu munculah banyak organisasi pembaharu Islam di dunia. Dan di tingkat internasional sendiri berdiri secara khusus organisasi yang mewadahi umat Islam, diantaranya adalah; OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau OIC (*Organization of the Islamic Conference*) yang merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari beberapa negara. Di Indonesia sendiri juga berhamburan organisasi yang menjunjung tinggi nama Islam (Baharun & Badriah, 2020). Bahkan tidak sedikit dari organisasi tersebut berperan aktif dalam membantu merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bahkan ada juga organisasi yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diplokanirkan. Sebut saja Jami'atul Khair (1901), Sarekat Islam (1912), Al-Irsyad (1914), Muhammadiyah (1912), PERSIS (1923), NU (1926) dan MASYUMI (1937).

Pendirian organisasi-organisasi tersebut didirikan secara sukarela oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama dan aspirasi untuk ikut berkontribusi dalam membangun keutuhan dan kejayaan negara. Kemudian datang pertanyaan yang memperlumahkan tentang mengapa di Indonesia banyak terdapat ormas Islam? Tentu jawabannya adalah karena mayoritas warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dan tujuan ormas sendiri pada dasarnya adalah untuk menjaga, memelihara, serta memperkuat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal inilah yang mengilhami bahwa contoh organisasi masyarakat yang baik adalah yang syarat akan keterlibatannya dalam mewujudkan tujuan negara.

Organisasi masyarakat yang baik adalah yang bisa memicu terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan malah bertindak "konyol" seperti menerapkan anarkisme yang melanggar hukum negara. Dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji tentang dua organisasi besar di Indonesia yang memiliki eksistensi yang tinggi hingga sekarang, bahkan memiliki jumlah masa atau pengikut yang tidak bisa dibilang sedikit. Yakni mengenai pembaharuan pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini berfokus pada sejarah hubungan antara gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang diangkat dalam meneliti, penulis menggunakan metode kualitatif, yakni metode data kualitatif memerlukan kemampuan dalam menganalisa perbedaan dalam data kualitatif, yang mana akan dapat diselesaikan apabila konsep-konsep teoritis yang dipakai kemudian didefinisikan dengan teliti dan baik. Dalam metode ini tujuan akhir dari kerja analisis sangatlah diperhatikan, yang kemudian hasil dari analisis dapat dijadikan jawaban mengenai variabel yang diutarakan (Putra, 2011)

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan konseptual yang menganalisis sejarah dan kontribusi gerakan Muhammadiyah dan NU untuk ummat Islam di Indonesia yang kemudian dibarengi dengan pendekatan komparasi dengan membandingkan konsep Muhammadiyah dan NU. Dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan kajian pustaka. Dengan mengumpulkan sumber-sumber kunci dari berbagai karya ilmiah berbentuk buku dan jurnal, serta dibarengi dengan sumber-sumber yang diambil dari berita terpopuler.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Muhammadiyah

Sebelumnya kita harus mengenal tentang gambaran besar sejarah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah sendiri merupakan gerakan pembaharu yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 Dzulhijjah 1330 H, atau bertepatan dengan 12 November 1912 M. Di Yogyakarta, Muhammadiyah sering dicap banyak kalangan sebagai organisasi Islam yang berwawasan Islam moderat. Yakni Muhammadiyah berupaya menampilkan corak Islam yang memadukan antara purifikasi dengan dinamisasi, dan bersifat moderat (wasatiyah) dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam. Muhammadiyah dengan watak ini berbeda dengan karakter gerakan-gerakan Islam lain yang cenderung ekstrem, baik yang bersifat radikal-fundamentalis ataupun radikal-liberal. Ideologi dengan karakter moderat ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan gerakan Islam radikal-liberal yang serba liberal dalam melakukan dekonstruksi atas ajaran Islam sehingga serba relatif; dan Gagasan Pendidikan pada saat yang sama berbeda dengan gerakan radikal-fundamentalis semisal Salafi, Wahabi, al-Ikhwan al-Muslimin, Taliban, Jemaah Tabligh, Islam Jemaah, Jemaah Islamiyah, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Ansharut Tauhid, Islam Tradisional, Majelis Tafsir al-Qur'ân, dan kelompok Syi'ah (Suharto, 2014).

Salah satu ciri gerakan Muhammadiyah yang moderat ditangan Kiai Dahlan adalah beliau tidak menafikkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi formal yang ada dalam ruang wilayah sebuah negara. Jadi merupakan kewajiban bagi pengurus organisasi untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah negara dimana Muhammadiyah berada, baik di Indonesia maupun negara lain. Walaupun pada masa pendiriannya yang berkuasa adalah Belanda, namun hal ini tidak menjadikan Kiai Dahlan mengabaikan masalah administratif (Karimi, 2012, p. 102).

K.H. Ahmad Dahlan sendiri merupakan seorang ulama yang kharismatik sekaligus kontroversial di masanya. Beliau sendiri lahir pada tanggal 1 Agustus 1864 dan wafat pada 22 Februari 1923. Beliau merupakan anak keempat dari K.H. Abu Bakar dan ibunya adalah putri dari H.Ibrahim yang merupakan pejabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Beliau sendiri memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Semenjak kecil ia selalu serius dalam belajar agama dan bahasa Arab. Setelah beranjak dewasa Muhammad Darwis memulai perjalanannya yang dimulai dari menunaikan ibadah Haji dan bermukim selama 5 tahun disana. Disana beliau bertemu dengan gurunya Sayyid Bakri Syatha dan memberikan nama baru yakni Ahmad Dahlan. Ia juga sempat berguru dengan Syekh Ahamad Khatib yang juga merupakan guru Kyai Hasyim Asy'ari (Dahlan, 2014).

Pemikiran Ahmad Dahlan sendiri banyak didasari pada pengalaman berguru selama bertahun-tahun, meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan dalam tahapan formal, Ahmad Dahlan banyak belajar pada beberapa alim ulama yang terkenal mempuni keilmuannya seperti; belajar Fiqih dari K.H. Muhammad Shaleh, Nahwu dengan K.H. Muhsin, ilmu Falaq dengan K.H. Raden Dahlan, ilmu Hadist dengan KH. Mahfud dan Syekh Hayyat, serta ilmu Qira'at yang ia peroleh dari Syekh Amin dan Syekh Bakri Satock, bahkan Ahmad Dahlan mempelajari ilmu pengobatan dan racun binatang dari Syekh Hasan. Juga diketahui bahwa Ahmad Dahlan sangat mengagumi pemikiran Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Jamaludin Al-Afghani (Baharun & Mundiri, 2011). Hal ini terlihat dengan pemahaman dan pembaharuan Islamnya yang berfokus pada pemurnian (tauhid) dan tidak beriman secara taqlid. Dalam buku K.H. AR. Fahrudin (Ketua Muhammadiyah 1968) yang berjudul Menuju Muhammadiyah, menjelaskan mengenai hal-hal yang telah dilakukan KH. Ahmad Dahlan sepanjang kepemimpinannya, antara lain: (a). Meluruskan Tauhid, Peng-Esaan terhadap Allah swt. Meluruskan keberadaan Allah sebagai Sang Khalik dan hubungan Allah dan makhluk-Nya tanpa perantara apapun; (b). Meluruskan cara beribadah kepada Allah swt. Tanpa adanya gerakan-gerakan yang kurang tepat dalam shalat; (c). Mengembangkan akhlakul karimah, etika sosial dan tata hubungan sosial sesuai tuntunan Islam. Jika diperhatikan secara garis besar maka bisa terlihat bahwa Ahmad Dahlan merupakan ciri Muslim fundamentalis yang mengembalikan semuanya kepada sumber utama Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian demikian beberapa pembaharuan yang dilakukan Ahmad Dahlan dalam hal; pembenaran arah kiblat di Masjid Agung Yogyakarta, pelurusan penentuan tanggal hari raya idul fitri yang ditentukan dengan hisab, penolakan terhadap Bid'ah dan Khurafat, dan perhatiannya terhadap pendidikan dan gerakan kemasayarakatan (Dahlan, 2014).

Ide dan Gagasan Muhammadiyah

Muhammadiyah sendiri lahir dari perenungan Kiai Dahlan, yang berkeinginan untuk menjadikan Islam harus sehat, kuat dan besar, sehingga bisa menyelamatkan dunia dengan selalu membela mereka yang kesusahan dan menderita. Oleh sebab itu, harus ada organisasi kesatuan dan persatuan

yang menempatkan, menaungi dan menjadi wadah dari buah pikiran yang mulia itu, maka didirikanlah Muhammadiyah. Dan dalam perancangan sistem organisasi ini sendiri merujuk pada Firman Allah, “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S: Ali Imron: 104). Ayat ini berorientasi pada seruan agar manusia selalu berbuat baik di dunia dengan memperbanyak amal sholeh dan menjauhi segala perbuatan buruk. Para aktivis gerakan Muhammadiyah sering mengatakan bahwa ayat itu merupakan ayat Muhammadiyah. Karena merupakan ayat yang menjadi landasan Kyai mendirikan Muhammadiyah (RI, 2019).

Haedar Natsir menjelaskan dalam karyanya mengenai “Khittah Perjuangan” yang merupakan program dasar yang menjadi pegangan seluruh anggota Muhammadiyah yang berisi: (1). Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam dan *ammar ma’ruf nahi munkar* yang bergerak di bidang kemasyarakatan, bukan di bidang politik praktis/ politik kekuasaan; (2). Muhammadiyah hidup dan bergerak dalam wilayah dan di bawah hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (3). Perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kepribadian Muhammadiyah (Nashir, 2016).

Amien Rais sendiri mengatakan bahwa “Muhammadiyah adalah gerakan yang berfungsi sebagai gerakan keagamaan sesuai jati dirinya”. Dan sejauh yang saya ketahui menurut data yang ada, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang paling maju dalam bidang amal usaha, tidak hanya skala nasional, tapi juga skala internasional. Dan Muhammadiyah sendiri merupakan gerakan yang praktis. Saat ini bisa kita lihat, bahwa grafiknya sedang menunjukkan kenaikan, khususnya dari segi kuantitatif, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dan yang paling terlihat adalah dalam bidang pendidikan (Najib, 1999; Dakir & Fauzi, 2019).

Menurut Zuly Qodir (2010), Muhammadiyah merupakan gerakan yang berorientasi dalam membangun moralitas keislaman masyarakat yang masih banyak diselimuti dengan tradisi-tradisi Hinduisme dan Budhiesme yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia dan menempatkan posisinya sebagai gerakan dakwah yang berupaya mentransfarmasi Islam sebagai bagian dari jiwa masyarakat Indonesia

Tawaran yang diberikan Muhammadiyah

Muhammadiyah yang merupakan organisasi dan gerakan sosial keagamaan yang didirikan oleh Kyai Dahlan adalah gerakan *tajdid* (reformasi; pembaharuan pemikiran Islam) yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Jawa dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkembangan Muhammadiyah sendiri bisa diterima dikalangan masyarakat luas dan dapat berkembang pesat. Orientasi pengembangan pendidikan yang dijadikan sebagai asas pergerakan berkembang ke bidang sosial yang lain seiring semakin besar dan meluasnya organisasi Muhammadiyah. (Marihandono, n.d)

Presiden Pertama Indonesia, Soekarno pernah memberikan pendapatnya mengenai Muhammadiyah. Dengan lantang beliau berbicara:

“Dengan sedikit bicara banyak bekerja, Muhammadiyah telah memodernisasi cara perkembangan Islam. Sehingga, di seluruh Tanah Air Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke telah berdiri cabang-cabang dan ranting-ranting. Selaku seorang yang pernah berkecimpung dengan lingkungan Muhammadiyah, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara supaya selalu berpegang teguh pada motto ‘banyak bekerja’. Inilah sebabnya Muhammadiyah berkumandang dan menjadi besar” (Anshory, 2010)

Maksud dan tujuan berdirinya Muhammadiyah sendiri adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sendiri cenderung lebih bergerak dan mementingkan pergerakannya di bidang pendidikan dan pengajaran yang berasaskan Islam, baik pendidikan dalam sekolah/ madrasah maupun pendidikan dalam masyarakat. Maka, tidak heran bahwa gerakan ini sejak mulai berdirinya telah banyak membantu NKRI dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun madrasah-madrasah dan mengadakan tabligh-tabligh, bahkan juga banyak menerbitkan banyak buku dan majalah yang menyiarkan agama Islam (Yunus, 1926)

Tujuan dan cita-cita yang diinginkan Muhammadiyah menurut Syarifuddin Jurdi adalah “Ingin melihat agama Islam dapat dilaksanakan oleh umatnya secara baik sehingga akan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dan cita-citanya adalah membuat umat Islam di Indonesia dapat menjalankan agamanya sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Adapun mengenai pemerintahan, partai politik, dan sebagainya Muhammadiyah tidak mencampurinya, karena keterlibatan anggota-anggotanya dalam partai politik bersifat individual dan tidak mewakili Muhammadiyah” (Jurdi, 2010)

Muhammadiyah sebagai ormas yang memiliki jumlah massa dan pendukung yang besar juga tidak luput dari problematika. Ada yang berpendapat bahwa Muhammadiyah itu di masa awal berdirinya adalah NU, fiqihnya menggunakan mazhab Syafi’i yang sama dengan NU. Kenapa demikian? Sebab Kiai Dahlan sendiri menimba ilmunya dari ulama-ulama yang sama tempat Kyai-kyai NU menimba ilmu. Satu guru satu ilmu, bahkan satu keluarga. Kiai Dahlan dan Kyai Hasyim adalah sama-sama keturunan Sunan Giri. Kiai Dahlan dan warga Muhammadiyah juga ketika itu mengamalkan qunut dan terawih 20 rakaat, mereka adzan jum’at 2 kali dan takbiran 3 kali. Mereka shalat Id di masjid bukan di lapangan. Pendek kata, umat Muhammadiyah kala itu sama dengan umat Islam sekarang yang diklaim sebagai NU. Sebab, amalan beliau-beliau adalah amalan NU. Lalu pertanyaannya sejak kapan Muhammadiyah berubah? (Shodiqin, 2013).

Jawaban dari pertanyaan itu adalah, bertahap. Kiai Dahlan mulai membuka Muhammadiyah untuk perkembangan global, akibat terlalu membuka diripun meruntuhkan sedikit demi sedikit paham fiqih bermazhab Syafi’i yang telah dianutnya. Bahkan pada tahun 1925 dua tahun sepeninggal Kyai Dahlan Muhammadiyah dinilai telah berubah dengan diterimanya paham wahabi yang anti amalan pesantren, momentumnya ditandai oleh pelaksanaan sholat id’ di lapangan tahun 1925 yang berbeda dari ajaran mazhab syafi’i.

Namun beruntung Muhammadiyah memiliki Kiai Mansur yang berkat jasanya mendirikan Majelis Tarjih di tahun 1927, Muhammadiyah tidak jadi terseret dari arus deras Wahabi global.

Muhammadiyahpun akhirnya bermetamorfosis dengan pengualifikasian empat masa yakni, Masa Syafi'i (1912-1925), Masa Pembauran Syafi'i-Wahabi (1925-1967), Masa HPT (1967-1995) dan Masa Pembauran HPT-Globalisasi (1995-hingga kini). Pada tahun 1927 itulah terjadi perubahan besar di tubuh Muhammadiyah, dengan menghilangnya jejak-jejak amalan NU yang diamalkan Kyai Dahlan dan masyarakat Muhammadiyah pada saat itu. Dan munculah statement dari banyak kalangan NU yang merasa telah kehilangan saudara tua (Shodiqin, 2013)

Fokus pembaharuan yang dibawa Kiai Ahmad Dahlan terlihat dalam usahannya untuk menyadarkan umat mengenai nasib dan tanggung jawabnya mengenai kehidupan duniawi yang mereka hadapi. Implementasi dari gagasan pembaharuan ini adalah pembersihan ajaran agama Islam dari kepercayaan takhayul dan khurafat. Dan juga pembersihan ketergantungan umat pada peran dukun dalam pengaruhnya terhadap masyarakat. Dapat disimpulkan gerakan pembaharuan Muhammadiyah meliputi beberapa hal berikut: 1. Pemahaman ajaran Islam dari sumbernya, Al-Qur'an dan Sunnah; 2. Mempermudah umat dalam memahami ajaran Islam dengan menerjemahkan Al-Qur'an dan Sunnah ke dalam bahasa Melayu; 3. Mendirikan sekolah modern dengan mendorong anak-anak muda untuk mengemban pendidikan di sekolah tersebut; 4. Mengelola lembaga sosial berbasis syariah (rumah zakat, rumah kurban) dengan manajemen yang modern; 5. Membantu kaum fakir miskin dengan pembangunan fasilitas yang bermutu dan terjangkau seperti rumah sakit, panti asuhan dan panti jompo; 6. Mengembangkan kerjasama kemanusiaan melalui suatu organisasi modern; 7. Menggerakkan umat Islam dalam menumbuhkan kesadaran untuk menolong sesama melalui pengelolaan lembaga zakat, waqaf, infak dan sedekah. (Marihandono, n.d)

Dalam hal pendidikan, peran Muhammadiyah tidak perlu diragukan. Sudah banyak sumbangsih yang diberika dalam bentuk lembaga pendidikan dari berbagai jenjang dari paud hingga Universitas. Tujuan pendidikan yang diusung oleh KH. Ahmad Dahlan adalah "dadiyo kyai sing kemajuan, lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah" (jadilah ulama yang berkemajuan, yang tidak mengenal menyerah yang tujuanmu untuk beramal membangun Muhammadiyah). Darir tuturan Kyai Dahlan dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah untuk melahirkan ulama-ulama yang cakap, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Sehingga mampu menjadi pribadi yang cerdas dan siap berjuang dalam masyarakat sebagai perekat sekaligus pemecah masalah dan menggerakkan kearah kemajuan. Disini nampak terlihat cita-cita pendidikan Muhammadiyah yang amat luhur (Ali, 2016).

Problem yang dialami Muhammadiyah setelah sekitar sepuluh tahun pendiri Muhammadiyah wafat adalah Muhammadiyah terlihat mulai berubah menjadi sebuah gerakan syariat yang jauh dari problem kehidupan umat. Dan mayoritasnya adalah dari kalangan masyarakat miskin, kaum buruh dan

petani. Dan mulai terikat dengan gerakan politik menjelang kemerdekaan. Selain itu generasi mudanya tidak mudah menangkap geliat ilmu modern yang terus berkembang. Dan mereka juga banyak yang gagal memahami kertas kuning dan kertas putih ilmu-ilmu modern. Dan lembaga pendidikan terus tumbuh sebagai lahan penunjang ekonomi bukan sebagai sarana dakwah dan peyuplai ilmu yang hakiki (Jurdi, 2010).

Dan yang perlu dicatat disini adalah Muhammadiyah selama ini tidak pernah memisahkan diri dari Bangsa ini, bahkan kader-kader Muhammadiyah sudah banyak yang berjasa memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Muhammadiyah juga bukan sekedar gerakan yang hanya menyeru "Amar Ma'ruf Nahi Munkar" yakni dengan mencegah kemunkaran dan menyeru kepada kebaikan. Yang perlu diapresiasi adalah dengan upayanya untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan dan ketertindasan dalam artian kebodohan, penyakit, maraknya kriminalisasi dan juga kebodohan. Dan hal yang sangat perlu diperhatikan disini, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang memerlukan para alim ulama yang banyak. Di tangan para ulama yang baiklah Muhammadiyah bisa menjadi lebih baik. Yakni ulama yang mewarisi sifat dan karakteristik para nabi sebagai tauladan yang baik. Karena jika bukan di tangan ulama, cekcok antar paham bisa menjadi fitnah. Dan di pangkuan para ulama lah Muhammadiyah dan NU bisa bersatu (Sobary, 2010).

Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sendiri merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di Surabaya. Organisasi ini dibentuk oleh para Alim Ulama dan diprakarsai oleh; K.H. Hasyim Asy'ari (Tebuireng), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisri (Jombang), K.H. Riduwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H.R Asnawi (Kudus), K.H.R. Hambali (Kudus), K. Nakhrawi (Malang), K.H. Doromuntaha (Bangkalan), K.H.M. Alwi Abdul Aziz dan masih banyak lagi. NU sendiri diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari (Yunus, 1926).

K.H. Hasyim Asy'ari banyak mengembang ilmu al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama dari kedua orangtuanya. Dalam perjalanan kariere intelektualnya, beliau juga banyak menimba ilmu di pondok-pondok pesantren seperti halnya; ponpes Shona, Siwalan Buduran, Langitan, Tuban, Demangan, Bangkalan dan Sidoarjo (Khoiriyah, 2017). Setelah mendirikan pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Hasyim Asy'ari mewarnai lembaga pendidikannya dengan pandangan dan metodologi tradisional. Ia banyak mengadopsi pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan aspek-aspek normatif, tradisi belajar-mengajar, dan etika dalam belajar yang dipandang telah mengantarkan umat Islam kepada zaman keemasan. Dalam karyanya, *Adab al-'Alim wa-Al-Mutta'allim*, KH. Hasyim Asy'ari terlihat banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan Islam klasik dan penulis-penulis klasik seperti Imam al-Ghazali dan Al-Zarnuji (Yunus, 1926).

K.H. Hasyim Asy'ari (Hadratussyekh) sendiri tidak hanya terkenal sebagai "muasas" terbentuknya ponpes Tebu Ireng dan organisasi Nahdathul Ulama. Tapi ia juga terkenal sebagai Kyai yang mampu membangun pesantrennya sekaligus memiliki andil dalam peran politik kenegaraan. Beliau

lahir di Jombang pada 14 Februari 1871 dan meninggal pada 21 Juli 1994 di usianya yang menginjak 76 tahun. Kyai Hasyim tidak hanya dihormati karena keteguhan pendiriannya, tetapi beliau juga dihormati sebagai seorang patriot yang mencintai tanah airnya. Ia tanpa kenal lelah mendidik santri-santrinya menjadi ahli agama sekaligus pejuang bangsa untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan tumpah darahnya. Kyai Hasyim bukan hanya melawan kolonialisme dalam arti militer, tetapi juga kolonialisme kultural (Margono, 2011).

Ide dan Gagasan NU (Nahdlatul Ulama)

Ide dari lahirnya NU sendiri adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan paham *ahlu sunnah wal jama'ah*, yang sudah ada sejak zaman Nabi dari sabotase para kaum pembaharu yang berhaluan Wahabi. Dalam menerapkan prinsip dasar organisasi, Kyai Hasyim merumuskan kitab *al-Qanun al-asasi li Jam'iyati Nahdlatul al-Ulama* (Prinsip Dasar NU) dan kitab *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah*. Dan dari kedua kitab tersebut dirumuskanlah Khittah NU, yang dijadikan rujukan masyarakat NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik (Hamzah, 2014).

Menurut Wahid Hasyim, NU merupakan suatu perhimpunan orang tua yang bergerak dengan lamban, tak terasa serta tak radikal dan revolusioner. Wahid juga melihat Nahdlatul Ulama sangat miskin kaum terpelajar. Dan sangat sulit menemukan akademisi di kalangan NU. Dan sebagai organisasi berbasis tradisional, Nahdlatul Ulama terlihat terlalu disiplin dalam masalah agama dan moral. Tuntutan kepada anggotanya supaya berdisiplin menjalankan kewajiban agama dianggap menjadi momok yang menghalangi, terutama pemuda untuk masuk Nahdathul Ulama (Tempo, n.d).

Menurut Djohan Effendi, NU merupakan organisasi Ulama tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukungnya adalah para Kya-kyai pesantren. Sejak awal berdirinya, NU sudah menempati posisi sentral dan memainkan peranan yang penting dalam kalangan masyarakat santri, terutama bagian pedesaan. NU menunjukkan kemampuan membangkitkan kesadaran beragama di kalangan umat Islam dan juga memperhatikan kesadaran komitmen dalam kehidupan umat Islam (Effendi, 2010).

NU merupakan salah satu wadah untuk membangun kekuatan yang lebih besar di kalangan umat Islam pada umumnya dan para alim ulama pada khususnya. Sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama adalah organisasi yang memfokuskan dakwahnya dalam pendidikan keagamaan dan tegaknya nilai-nilai Islam di Tanah Air Tercinta (Dakir & Anwar, 2019). Ulama sendiri merupakan pemimpin umat yang selalu berada di garis depan memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan wawasan keilmuan mereka. Maka dari itu timbulnya organisasi yang mewadahi ulama merupakan keniscayaan. Dengan begitu lahirlah organisasi tersebut dengan persetujuan beberapa ulama dari berbagai daerah (Misrawi, 2010).

Pembentukan Nahdathul Ulama (Kebangkitan Ulama) sendiri setidaknya memiliki empat motif dalam pendiriannya. Motif yang pokok yang

mendasari gerakan NU ini adalah motif keagamaan sebagai *jihad fii sabilillah*. Motif kedua adalah tanggung jawab dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan usaha pelestarian madzhab *ahlussunnah wal jama'ah*. Motif ketiga adalah dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan terbentuknya *Nahdathul Wathan, Tasywirul Afkar* dan *Ta'mirul Masjid*. Motif yang terakhir adalah motif politik yang ditandai dengan semangat Nasionalisme serta obsesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam (Huda, 2013).

Tawaran yang dimiliki Nahdlatul Ulama

Dalam perjalanannya, NU juga kerap kali terjebak pada situasi temporer, terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para tokohnya tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis. Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang adanya basis massa politik yang riil yang secara kuantitatif memiliki posisi tawar kuat. Barangkali juga ada anggapan, "daripada basis massa dimanfaatkan oleh pihak lain, lebih baik untuk kepentingan politik dan ekonomi kalangan internal NU sendiri". Makanya, tidak heran kalau perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dengan kiprah politiknya yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan segelintir elite NU sendiri (Margono, 2011).

Berubahnya NU sendiri dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik ternyata memiliki dampak besar atas pola kepemimpinan politik umat Islam Indonesia yang selama ini dikuasai oleh kelompok modernis. Tuntutan politik yang tidak ringan, serta kurangnya personal membuat NU kurang memprioritaskan aktivitas sosial dan dakwahnya. Hal ini juga banyak mendorong tindak korupsi di tubuh NU (Huda, 2013).

Dalam urutan tahun 1952 sampai 1976 adalah masa dimana sedang gencar-gencarnya NU berpolitik. Dalam rentan perjalanan panjangnya, pada kurun waktu inilah NU paling banyak berkecimpung dalam kegiatan politik guna mencapai tujuannya di bidang agama, sosial dan ekonomi. Dan masa ini merupakan masa yang paling menonjol dalam peran NU di kancah politik nasional (Fealy, 2013). Bahkan pada tahun 1952 NU merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Wahid Hasyim merupakan orang pertama yang mempelopori kesadaran politik dikalangan para Kyai NU. Sebagaimana terlihat pada hasil pemilu 1971 NU merupakan organisasi paling besar dan paling kuat. Dari jumlah pemungutan suara oleh partai-partai Islam dalam pemilu 1971 sebanyak 18,67% atau 64% dari suara tersebut berasal dari NU (Bashri & Suffathni, 2014).

Pendapat Nur Choliz Madjid mengenai NU, "Islam yes, partai Islam no", *Mbok yo NU tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang kiprah utamanya menjadi perekat ukhwah Islamiyyah umat, terutama di bidang pendidikan dan sosial-ekonomi. Betul, NU kan organisasinya Ulama, sudahlah umat itu perlu ilmu pengetahuan agama dari ulama'kan, selalu dinyatakan bahwa ulama adalah warisan para Nabi* (Sobary, 2010).

Fakta yang seperti itu memang sulit dihindari, akan tetapi tidak perlu resah kalau nanti makna ke-NUan semakin lama semakin pudar. Sebab, semua sumber dayanya boleh jadi terserap ke dalam pusaran politik praktis yang dimainkan oleh elite NU sendiri. Kalau dulu, setidaknya di era kepemimpinan Gus Dur yang cukup mengesankan itu, faksi-faksi di NU masih didominasi oleh gerakan kultural, aktivis kebangsaan dan intelektual, sementara faksi politik berada di pinggiran, saat ini justru faksi politiklah yang menjadi kekuatan dominan. Apabila di kedepannya NU tidak segera melakukan evaluasi keseluruhan bukan tidak mungkin nantinya ini akan menjadi bumerang di kemudian hari (Margono, 2011).

Dan munculah kaum Muslim modernis yang merupakan salah satu gerakan yang tidak menyukai NU. Mereka sendiri merupakan kelompok yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap keimanan dengan memurnikannya dari unsur-unsur non-Islam dan menjadikannya sesuai dengan tuntutan zaman modern dengan menggunakan metode dalam bidang organisasi dan pendidikan yang berasal dari Barat. Alasan mereka tidak menyukai NU, sejak penarikan NU dari Masyumi yang didominasi kaum modernis 1952, kedua partai ini terus bersaing dalam mencari dukungan masyarakat Muslim. Tapi seiring dengan kemajuan politik NU di tahun 1950an dan bersamaan dengan kemunduran Masyumi membuat para kaum modernis semakin membenci NU. Mereka menganggap NU telah berulang kali mengkhianati Masyumi dan memperjuangkan Islam untuk kepentingan dirinya melalui aliansinya dengan partai-partai non Muslim (Margono, 2011).

NU sendiri sering menjadi bahan kritik para pengamat Barat dan kaum modernis. Dan mengenai status yang sering disematkan terhadap NU ialah sebagai kaum oportunistis. Dalam pengamatannya seperti Justus Van de Kroef, ia menanggapinya dalam tulisannya tentang perilaku NU di pada pertengahan 1960 yakni NU seperti halnya yang terjadi di masa lalu secara oportunistis selalu memihak pada pihak yang menang. Bahkan menurut Arnold Backman, NU adalah "Agen bebas yang sering beraliansi dengan pemberi tawaran lebih tinggi. Para Kyai ini, siap bekerjasama dengan kelompok manapun termasuk PKI asalkan perasaan keagamaan mereka tidak diganggu dan tuntutan finansialnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan sikap NU yang sering berubah-ubah dan keinginan mencari keselamatan dan mempertahankan posisinya di pemerintahan (Zhada & Syadzili, 2010).

Dalam tubuh NU sendiri juga muncul gejolak yang tidak mudah dipadamkan. Yakni adanya perseteruan antara K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Hasyim Muzhadi. Pada Mukhtar ke-30 NU di Solo terjadi perpecahan yang terjadi di tubuh NU. Dimana adanya ancaman dari K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk membuat NU tandingan, apabila K.H. Hasyim Muzhadi terpilih menjadi ketua umum Tandfiziyah PBNU periode 2004-2005. Hal ini kiranya didukung oleh para kaum nahdliyin untuk menjadikan NU tetap Khittah 1926 yang lalu. Hal ini dikarenakan NU telah dijadikan kendaraan politik oleh sebagian elite Tandfiziyah yang lima tahun belakangan dipimpin oleh K.H. Hasyim Muzhadi. Hal ini dianggap melanggar konsep kembali ke Khittah 1926. Akan tetapi Hasyim sendiri tetap eksis dalam

menjalankan perlawanan terhadap kelompok yang kontra terhadap dirinya (Zhada & Syadzili, 2010).

Perseteruan pun sampai pada klimaksnya ketika pada proses pencalonan capres/cawapres Gus Dur tak menghendaki Hasyim Muzhadi menjadi cawapres mendampingi Megawati. Akan tetapi Hasyim sendiri tidak menggubris himbauan tersebut. Hal ini juga tidak bisa diposisikan dari tradisi NU yang memosisikan dirinya sebagai Kyai dan Hayim sebagai santri. Seorang Kyai atau mantan santri setidaknya harus tunduk dan hormat pada Kyai senior walaupun ia juga sudah menjadi Kyai. Apalagi notaben Gus Dur sebagai darah biru. Tetapi Hasyim menunjukkan watak sebaliknya bahkan cenderung melawan. Apalagi ia merasa sebagai pimpinan NU yang berhasil membawanya naik daun pada kurun waktu lima tahun kepemimpinannya (Zhada & Syadzili, 2010).

Masalah yang paling pelik yang terjadi pada tubuh NU adalah godaan kekuasaan. Apalagi pada perjalanan sejarahnya NU tidak bisa dilepaskan dari politik dan kekuasaan. Contohnya Kyai Haji Idham Chalid selama 32 tahun kepemimpinannya (1952-1983) tidak pernah meninggalkan dunia politik selama menjadi ketua PBNU. Kyai Idam Chalid bertanggung jawab atas perkembangan organisasi ini dalam perpolitikan di Indonesia. Beliau ditetapkan menjadi ketua tepat setelah NU menarik diri dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Pemerintahannya pun berlanjut pada masa Orde Baru, saat itu NU dipaksa untuk bergabung dengan PPP yang baru dibentuk di tahun 1973 (Burhanudin, 2013).

Kekuasaan Idham Chalid sendiri berakhir setelah pada Munas Situbondo tahun 1983 Ahmad Siddiq yang tampil sebagai ulama senior memiliki peran penting dalam menetapkan arah baru NU. Yang antara lain adalah pemulihan Khittah 1926 dan deklarasi hubungan antara Pancasila dan Islam. Pada saat itu dengan dukungan para ulama senior dan dihormati ketika itu di Munas Situbondo, meminta agar Idham Cholid menanggalkan jabatannya. Dan terjadilah perang kekuasaan antara “kelompok Situbondo” pimpinan Gus Dur dan “kelompok Cipete” pimpinan Idham Chalid. Dan hasil dari Kongres NU 1984 di Situbondo menetapkan adanya pemimpin baru di tubuh NU yakni Ahmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid. Masing-masing memegang peran sebagai ketua Syuriah dan Tanfidziah. Pada saat itu terjadi keputusan penting di kongres 1984, yang pertama menerima tawaran-tawaran pemerintah agar menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia. Dan yang kedua, menarik NU dari politik formal dan menarik NU kembali ke Khittah 1926 dengan konsentrasinya pada masalah sosial-keagamaan (Burhanudin, 2013, p. 387).

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid, NU yang sekarang adalah NU tahun 1926 dengan perangkatnya: *Tanfiziyyah* dan *Syariyyah*, bahkan lebih keras lagi dengan adanya sistem Mustaysar. Tetapi sekaligus bisa dikatakan NU sekarang bukan NU yang dulu. Karena didalamnya telah berkembang prihal cara pandang dan pemikirannya. Tapi perubahan-perubahan ini masih dalam konteks kelembagaan semata. Karena terjadi perubahan dalam segi budaya maka berubah juga konteks masyarakatnya. Dengan begitu, tantangan yang

dihadapi umat Islam secara umum adalah bagaimana mengisi Pancasila, NKRI, dan sistem ekonomi politiknya dengan wawasan Islam. Yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat tadi (Wahid, 2010).

NU yang selama ini terkesan dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan perkembangan dalam berpikir yang tinggi, dibandingkan dengan organisasi modern yang malah tampak diam di tempat. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama nahdhiyin ternyata justru membuka wawasan yang membentang luas dalam melihat perubahan social (Dakir, 2017). Pemahaman agama bergerak tidak lagi secara tekstualis, tetapi kontekstual. Tentunya ini perlu dipandang sebagai kemajuan di dalam NU. Kemajuan peradaban sendiri biasanya selalu lahir dalam suasana kebebasan pikir (Sunarto, 2013).

Hubungan NU dan Muhammadiyah dalam Pembaharuan Islam di Indonesia

NU dan Muhammadiyah sendiri merupakan dua gerakan pembaharuan yang memiliki kedalaman yang sangat potensial dalam membangun pembaharuan Islam di Indonesia. Selain memiliki jumlah massa yang sangat banyak, organisasi ini juga memiliki struktur organisasi yang rapih sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adanya rasa persaudaraan antara Muhammadiyah dan NU semakin membuat angin segar dalam gerakan pembaharuan yang ada di Indonesia. Semenjak menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah (1921-1945) Kiai Mansur langsung membawa pembaharuan dengan mendamaikan antara Muhammadiyah dan NU yang dibantu oleh sahabat lamanya yakni Kyai Wahab dan mendirikan rumah besar yang diberi nama MIAI tahun 1937 dan Masyumi 1943. Walaupun Muhammadiyah dan NU memiliki kultur yang berbeda akan tetapi masih banyak hal yang mampu membuat keduanya saling menyatukan hati (Shodiqin, 2013).

Kedua gerakan ini juga merupakan gerakan yang tidak menepis bahwa mereka termasuk ke dalam kaum *Ahlus sunnah wal jamaah*. Persatuan Muhammadiyah dan NU sendiri membuat mereka terselamatkan dari keganasan perang dunia yang menggunakan paham demokrasi, komunisme, nasionalisme dan rasisme yang saat itu menggerogoti Indonesia. Telah terbukti dengan adanya persatuan itu membuat kepulauan Indonesia tetap utuh. Walaupun fiqihnya telah dipebaharui sesering apapun, tetapi pemurnian tauhid akan kalah tanpa adanya ukhuwah. Muhammadiyah dan NU sendiri sebagai gerakan yang besar sangat mendukung adanya proklamasi kemerdekaan 1945 oleh Soekarno-Hatta. Namun pada saat itu negara sedang dalam keadaan darurat dengan adanya dua kubu yang tidak menyepakati kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, yakni Munawar Musa dari PKI dengan dukungan Soviet yang menginginkan proklamasi tahun 1948 dan Kartosuwiryo dari NII proklamasi 1949. Dengan begitu terjadilah perang dingin yang tidak hanya melawan sekutu, tapi juga melawan saudara pribumi yang bersebrangan paham. Dan di tahun 1950 Soekarno berhasil mengubah RIS menjadi NKRI.

Ternyata banyak pejabat yang tidak setuju mengenai adanya perubahan tersebut dan merasa dirugikan yang kemudian melakukan pemberontakan. Antara lain NII, RMS dan Andi Aziz. Hubungan NU dengan Masyumi pun merenggang hingga NU mengeluarkan diri dari tubuh Masyumi 1952 yang mengikuti SI terlebih dahulu keluar di tahun 1947 (Shodiqin, 2013).

Ternyata dibalik hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah, dulu pernah terjadi konflik antara dua organisasi tersebut. Menurut penjelasan orang terdahulu, perpecahan tersebut diakibatkan oleh perebutan gelar atas pengakuan sebagai umat Islam yang paling benar sendiri, yang paling dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Lantas apakah perpecahan tersebut direstui oleh Rasulullah? Jawabannya sudah pasti tidak. Meskipun perpecahan merupakan sunatullah, tetap saja provokator yang menimbulkan perpecahan tersebut. Toh, bersatu dan bergotong royong jauh lebih baik dan mudah untuk membangun pondasi yang kokoh dan menjaga dari serangan pihak luar yang tidak mengoyahkan pondasi tersebut. Selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto, sang Bapak Pembangunan tersebut dikenal dengan dekat banyak ulama NU, seperti kedekatannya dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Bahkan dalam tradisi keluarga cendana beliau mempraktekan tahlilan dan yasinan bahkan sampai digunakan untuk mengingat peringatan kematian sepeninggal sang mantan penguasa orde baru tersebut. Bisa dibilang pengaruh kedekatan Presiden orde baru tersebut diakui ataupun tidak diakui secara tidak langsung mempengaruhi berbagai perubahan dalam tubuh NU, termasuk fiqih (Shodiqin, 2013).

Era perubahan pun terjadi dimulai dari tahun 1995, yakni setelah lengsernya Presiden Soeharto selama 32 tahun, Amien Rais selaku ketua PAN sekaligus mantan ketua Muhammadiyah berhasil mengambil alih pemilu 1999. Meskipun pada saat itu PAN memperoleh suara 7,12%, PDI-P 33,74%, Golkar 22,4%, PPP 10,71% dengan "Poros Tengah" yang digagas oleh Amien Rais Muhammadiyah dan NU dapat menang disitu dengan mempersatukan NU dan Muhammadiyah. Dengan K.H. Abdurrahman Wahid (NU) menjadi Presiden dan K.H. Amien Rais menjadi Ketua MPR. Poros Tengah yang dijalankan itu serupa dengan yang dijalankan Soekarna-Hatta pada awal kepemimpinan Indonesia dulu. Di masa kepemimpinan Amien Rais, Muhammadiyah dibawa untuk adil terhadap kebudayaan. Hal ini terlihat dengan diadakannya sidang Tanwir di Denpasar pada tahun 2002. Sosok Amien Rais sendiri memunculkan kepemimpinan kaum cendekiawan yang menggantikan ulama atau kiai. Di masa kepemimpinan Din Syamsudin tahun 2005, beliau ingin mengembalikan Muhammadiyah ke masa Kiai Dahlan. Meskipun berada di era globalisasi, beliau berusaha mengupayakan revolusi damai yang tentu memiliki banyak kemaslahatan bagi masyarakat di banding revolusi fikih yang mengguncah ukhwah Islamiyah. Din Syamsudin merupakan sosok cendekiawan Muslim yang berani menyuarakan kebenaran dan tidak ragu untuk bergaul dengan NU. Hal ini mengilhami ucapan Kiai Dahlan, "Kutipkan Muhammadiyah kepadamu," Dan tugas generasi selanjutnya adalah menjaga Muhammadiyah agar berjalan sesuai jalurnya (Shodiqin, 2013).

KESIMPULAN

Peran dari kedua organisasi besar di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama memang tidak bisa ditawar lagi. Perubahan zaman tidak membuat dua organisasi ini punah ditelan arus, bahkan tetap eksis hingga kini. Bahkan eksistensinya terlihat hingga penjuru dunia. Dimana dijadikan rujukan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan agama, negara, maupun kelompok atau individu.

Pemikiran Kiai Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah dikenal dengan pemikiran yang brilliant sehingga mampu membawa Muhammadiyah berdiri dan eksis hingga seabad lebih lamanya. Semangat keagamaan yang dipadukan dengan kehidupan sosial masyarakat menjadi nilai lebih dari Muhammadiyah. Tidak hanya berfokus terhadap pemurnian akidah tapi Muhammadiyah juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan Muhammadiyah juga turut andil dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membantu mendirikan madrasah-madrasah yang berbasis Islami.

Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari menjadikan NU sebagai jalan dakwah sesuai apa yang ia pelajari ketika menimba ilmu puluhan tahun di kota suci Mekkah. Dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya yang dimiliki bangsa ini, yang kemudian dimodifikasi sesuai ajaran Islam dan disampaikan kepada masyarakat awam yang masih kental dengan unsur budaya Hindu-Budha. Bahkan dengan hal itu NU menjadi organisasi yang memiliki massa yang sangat banyak jumlahnya.

Muhammadiyah dan NU telah banyak memberikan sumbangsih besar terhadap tegapnya pondasi bangsa hingga hari ini. Meskipun tidak sedikit guncangan yang menerpa kekokohan bangsa, tapi NU dan Muhammadiyah dengan sigap mampu meredamnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa perbedaan keduanya sangat kontras khususnya pada pemahaman keagamaan. Padahal jika melihat sejarah keduanya, perbedaan hanya terletak pada pendekatan dakwah yang dijalankan selama ini. Hal inilah yang membuat terjadinya penilai sepihak kepada dua organisasi ini baik dari luar organisasi maupun anggota organisasi sendiri.

Untuk itu sangat penting untuk mengetahui sejarah kedua organisasi besar ini, yang pada dasarnya memiliki misi dan tujuan yang sama yakni menerapkan ajaran Islam yang benar di bumi Indonesia sebagaimana sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Keikhlasan dan perjuangan kedua pendiri ini sudah membuktikan kontribusinya dalam membangun peradaban Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah. *Profetika*, 17(1).
- Anshory, N. (2010). *Matahari Pembaharuan*. Yogyakarta: Jogja Bangkit.
- Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 1-20.
- Baharun, H., & Badriah, F. N. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 37-51. Retrieved from <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Bashri, Y., & Suffathni. (2014). *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Lkis.
- Burhanudin, J. (2013). *Ulama dan Kekuasaan*. Jakarta: Mizan.
- Dahlan, M. (2014). K.H. Ahmad Dahlan sebagai Tokoh Pembaharu. *Jurnal Adabiyah*, 17(2).
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28-54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Dakir, & Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligian: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92-100. Retrieved from <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>
- Effendi, D. (2010). *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Fealy, G. (2013). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1968*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Hamzah, M. (2014). *Pengantar Studi Ahwaja An-Nahdili*. Yogyakarta: Lkis.
- Huda, N. (2013). *Islam Nusantara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jurdi, S. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*. 2010: Pedana Media Group.
- Karimi, A. F. (2012). *Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Gresik: MUHI.
- Khoiriyah, R. (2017). Revitalisasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kiai Hasyim Asy'ari. *Jurnal Islam Nusantara*, 1(2).
- Margono, H. (2011). K.H.Hasyim Asy'ari dan Nahdathul Ulama. *Media Akademika*, 26(3).
- Marihandono, D. (n.d.). *K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923)*. Museum Kebangkitan Nasional.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Najib, M. (1999). *Suara Amien Rais Suara Rakyat*. Jakarta: Gema Insani.
- Nashir, H. (2016). *Muhammadiyah Gerakan Pembaharu*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Putra, H. S. A. (2011). Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Antropologi. *Perkembangan Teori Dan Metode Antropologi*. Surabaya: Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Qodir, Z. (2010). *Muhammadiyah Studies*. Yogyakarta: KANISIUS.
- RI, T. P. K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shodiqin, M. A. (2013). *Muhammadiyah itu NU*. Jakarta: Noura Books.
- Sobary, M. (2010). *NU dan KEINDONESIAAN*. 2010: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, T. (2014). Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU. *Islamica*, 9(1).
- Sunarto, A. (2013). Paradigma Nahdathul Ulama terhadap Modernisasi. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(2).
- Tempo, S. B. (n.d.). *Tokoh Islam di Awal Nusantara*.
- Wahid, A. (2010). *Menggerakkan Tradisi Essai-essai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Yunus, M. (1926). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Baharun, H., & Badriah, F. N. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 37-51. Retrieved from <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28-54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Dakir, & Anwar, H. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 495-517.
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligian: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92-100. Retrieved from <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>
- Zamroni. (2017). Arah Baru Pendidikan Islam: Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Monokhotomik. *Hikmah*, 13(2), 1-34.
- Zamroni, Ilyasin, M., Baharun, H., & Tohet, M. (2020). Multicultural education in a religious life: Developing harmony among religions in southeast asia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, (August), 3791-3801.
- Zhada, K., & Syadzili, F. (2010). *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Buku Kompas.